

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sumber Dana keuangan pada Badan Diklat Provinsi Bengkulu

Paradigma baru pengelolaan keuangan negara sesuai dengan paket peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara meliputi Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, dan RUU Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (disetujui dalam sidang paripurna DPR tanggal 21 Juni 2004) setidaknya mengandung tiga kaidah manajemen keuangan Negara, yaitu: orientasi pada hasil, profesionalitas serta akuntabilitas dan transparansi.

Kebijakan pemerintah mengeluarkan kebijakan reformasi di bidang pengelolaan keuangan membuktikan bahwa pola pengelolaan administrasi publik dalam era reformasi dan globalisasi yang bercorak desentralisasi dengan penekanan pada sumberdaya manusia sebagai unsur utama dalam pengembangan dinamika pengelolaan pelayanan publik sudah sesuai dengan semangat proses reformasi birokrasi di lingkungan instansi pelayanan publik. Pola pembiayaan yang sentralistik selama ini sangat dirasakan sebagai penghambat oleh banyak instansi pelayanan publik dalam pengambilan keputusan, di tengah dunia global yang begitu dinamis di mana arus modal, sumber daya dan tenaga kerja mengalir begitu cepat

dari satu ke negara ke negara lain tanpa mengenal batas kedaulatan dan wilayah. Situasi tersebut merupakan peluang dan sekaligus ancaman bagi setiap individu, kelompok maupun institusi. Bagi yang kreatif dan antisipatif hal itu juga akan dengan mudah dalam mengubah ancaman menjadi peluang melalui pola korporasi untuk membentuk kekuatan dalam memenangkan persaingan.

Administrasi keuangan adalah sebagai tata penyelenggaraan keuangan dalam pelaksanaan anggaran belanja Negara. Untuk mencapai tingkat efisiensi yang maksimal dalam penyediaan dan penggunaan keuangan bagi kegiatan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah ditempuh proses penyusunan anggaran. Anggaran adalah suatu rencana keuangan yang disusun untuk penyelenggaraan suatu kegiatan dalam jangka waktu tertentu, biasanya untuk satu tahun. Perputaran tahun anggaran disebut budget cyclus.

Sumber dana yang digunakan untuk kegiatan di Badan Diklat adalah dari APBD. Sedangkan Penerimaan Badan Diklat Provinsi Bengkulu berasal dari Pendapatan daerah yang terdiri dari biaya penyelenggaraan diklat dari Kabupaten/Kota serta biaya sewa ruang belajar, ruang aula dan asrama.

Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Kepala Badan Diklat Provinsi Bengkulu sebagai berikut :

“iya di Badan Diklat Provinsi Bengkulu sumber dana dalam rangka penyelenggaraan kegiatan berasal dari dana APBD dan ada juga dana Pusat (APBN), sedangkan PAD kita berasal dari

penyelenggaraan diklat Swadana Kabupaten/Kota serta dari biaya sewa asrama, ruang belajar dan aula.

Hal yang sama juga dijelaskan Oleh bendahara penerimaan Badan Diklat Provinsi Bengkulu sebagai berikut :

Sumber anggaran Badan Diklat berasal dari APBD per tahun anggaran, sedangkan PAD didapat dari biaya sewa ruang belajar, aula dan asrama serta biaya diklat dari peserta diklat Swadana yaitu kontribusi Kabupaten/Kota.

Pendapatan itu sendiri meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali daerah dalam satu anggaran yang tidak perlu di bayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah selain PAD dan Dana Perimbangan, adalah lain-lain pendapatan daerah yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang di tetapkan oleh pemerintah. Hibah yang merupakan bagian dari lain- lain pendapatan daerah yang sah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan jasa yang berasal dari pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat.

Administrasi keuangan meliputi kegiatan perencanaan, penggunaan, pencatatan, laporan dan pertanggungjawaban dana yang dialokasikan untuk menyelenggarakan pendidikan. Dalam administrasi keuangan ada pemisahan tugas dan biasanya dikelola oleh bendaharawan yang melakukan pembukuan sesuai dengan aturan yang berlaku,

administrasi keuangan ini ada ditangan urusan administrasi sedangkan bendaharawan ditunjuk sesuai dengan peraturan yang berlaku

2. Administrasi Perencanaan keuangan pada Badan Diklat Provinsi Bengkulu

Perencanaan merupakan langkah awal dalam setiap kegiatan, tanpa perencanaan yang baik, maka suatu kegiatan tidak akan berjalan dengan sukses. Perencanaan yang dimaksud adalah perencanaan dalam pengelolaan administrasi keuangan di Diklat Provinsi Bengkulu, yakni perencanaan anggaran kas. Wawancara dengan Kepala Diklat Provinsi Bengkulu selaku Pengguna Anggaran (PA), bagaimana administrasi perencanaan dalam pelaksanaan keuangan di Badan Diklat Provinsi Bengkulu?

“Ya perencanaan administrasi keuangan di Badan Diklat Provinsi Bengkulu dimulai dari pembahasan Rencana Kerja (Renja) yang dibahas di Bappeda Provinsi Bengkulu yang kemudian terbitlah KUA PPAS atau plafon anggaran sementara untuk masing masing SKPD, selanjutnya dari KUA PPAS disusun Rencana Kerja Anggaran yang kemudian di sahkan oleh DPRD Provinsi Bengkulu sehingga dari Rencana Kerja Anggaran yang telah disetujui kemudian disusun rencana anggaran kas yang nantinya dari rencana anggaran kas ini disusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang merupakan dasar dalam pelaksanaan keuangan bagi SKPD Badan Diklat Provinsi Bengkulu”

Hal ini juga dibenarkan oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan yang menangani dalam pelaksanaan perencanaan keuangan?

“Ya dalam pelaksanaan perencanaan keuangan dimulai dari penyusunan Renja selanjutnya terbit KUA PPAS yang merupakan plafon anggaran sementara dalam rangka penyusunan RKA atau Rencana Kerja Anggaran. Selanjutnya apabila RKA telah disetujui oleh DPRD maka disusunlah rencana anggaran kas yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disahkan melalui Peraturan Daerah dan

merupakan pedoman bagi SKPD dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan.”

Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) telah disusun untuk masing masing kegiatan baik kegiatan Rutin maupun kegiatan untuk masing masing Bidang-Bidang yang ada di Badan Diklat Provinsi Bengkulu untuk satu tahun anggaran. Anggaran untuk masing masing kegiatan ada yang disesuaikan dengan indeks jenis diklat dan ada yang didasarkan dari petunjuk baik dari Biro Pengelolaan Keuangan maupun dari Lembaga Administrasi Negara selaku pembina kepegawaian dan diklat. Selain DPA juga disusun anggaran kas guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA Badan Diklat Provinsi Bengkulu.

Anggaran kas juga memuat arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.

Hal ini juga dijelaskan oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sebagai berikut :

“untuk pelaksanaan kegiatan baik kegiatan rutin maupun kegiatan di masing masing bidang, anggaran tentu berbeda beda, disesuaikan dengan indeks Standar Biaya Umum (SBU) untuk masing masing kegiatan”.

Disamping itu juga dalam merencanakan pengelolaan keuangan. Wawancara dengan Kepala Diklat Provinsi Bengkulu, bagaimana merencanakan pengelolaan keuangan?

“Ya dalam mengelola keuangan diperlukan peratanggungjawaban pada setiap kegiatan pengeluaran keuangan, sehingga kegiatan tersebut jelas dan tidak menimbulkan penyimpangan-penyimpangan”

Administrasi Perencanaan Keuangan di Badan Diklat Provinsi Bengkulu, (A) fase perencanaan keuangan Meliputi: a) Usulan kegiatan beserta anggaran dari masing-masing Bidang yang terdiri dari Bidang Diklat Fungsional, Bidang Diklat Teknis, Bidang Diklat Kepemimpinan serta Bidang Pengembangan Kediklatan. b) Selanjutnya dilakukan rapat koordinasi bersama sama dengan Kepala Badan Diklat Provinsi Bengkulu selaku Pengguna Anggaran dalam rangka sinkronisasi dan pemantapan penyusunan RKA-KL dengan masing-masing bidang. Kemudian Staf Perencanaan atau Keuangan mengirim hasil usulan kegiatan Rencana Anggaran ke Biro Pengelolaan Keuangan. Kemudian Tim Perencanaan menyusun rencana kerja anggaran untuk SKPD Badan Diklat dan menetapkan pagu sementara. Pagu sementara tersebut selanjutnya ditelaah bersama sama.

Langkah selanjutnya Tim Perencanaan menyusun kembali RKA-KL disesuaikan dengan pagu definitif yang diterima berdasarkan Rancangan APBD yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah bersama DPRD. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) disusun dengan mempedomani petunjuk teknis yang ada. c) RKA disampaikan kepada DPRD untuk dimusyawarahkan dan disahkan dengan peraturan daerah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

3. Administrasi Pengalokasian Keuangan pada Badan Diklat Provinsi Bengkulu

Pada dasarnya penyelenggaraan kegiatan di Badan Diklat Provinsi Bengkulu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di Badan Diklat Provinsi Bengkulu. Pengalokasian dana secara garis besar terdiri dari alokasi belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal yang dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu Alokasi Belanja Langsung dan Alokasi Belanja Tidak Langsung. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bendahara Pengeluaran Badan Diklat Provinsi Bengkulu dapat dijelaskan sebagai berikut :

“Peralokasian anggaran diperuntukkan untuk belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal yang dikelompokkan menjadi dua Belanja yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Untuk belanja langsung ya seperti untuk kegiatan rutin, misalnya untuk biaya pembelian Alat Tulis Kantor, untuk belanja listrik, surat kabar, dan biaya operasional lainnya. Kedua juga untuk kegiatan dibidang bidang baik itu kegiatan yang berada dalam lingkup Sekretariat, kegiatan yang berada pada bidang bidang baik kegiatan yang ada di Bidang Diklat Fungsional, Bidang Diklat Teknis, Bidang Diklat Kepemimpinan serta kegiatan yang ada pada Bidang Pengembangan Kediklatan. Sedangkan untuk belanja tidak langsung itu seperti pembayaran gaji pegawai tiap bulannya, tunjangan atas beban kerja, pembayaran uang makan, tunjangan fungsional widyaiswara, rapel gaji, dan sebagainya. Namun tentu untuk pembayaran belanja tidak langsung untuk gaji dan sebagainya ditentukan juga oleh golongan masing masing pegawai yang nantinya untuk golongan III ke atas dikenakan potongan pajak penghasilan”.

Sesuai keperuntukan dan kebutuhan di Badan Diklat Provinsi Bengkulu, seperti: anggaran Belanja Pegawai, anggaran Belanja Barang Jasa dan anggaran Belanja Modal. Hal ini dibedakan lagi menjadi anggaran rutin operasional sehari-hari, pengadaan sarana dan prasarana,

pembangunan prasarana dan sarana, dan sebagainya serta kegiatan dalam rangka pengembangan standar kinerja pegawai, seperti kegiatan diklat kepemimpinan, diklat fungsional dan kegiatan diklat teknis serta kegiatan dalam rangka pengembangan kediklatan.

Pengalokasian penggunaan dana yang bersumber dari APBD sudah dialokasikan sesuai dengan yang sudah ditetapkan dalam DPA dan disesuaikan dengan proporsinya masing-masing. Hal ini sesuai apa yang telah dikatakan oleh Kepala Badan Diklat Provinsi Bengkulu:

“Pengalokasian penggunaan dana APBD sudah di atur sesuai proporsi dan ada di dalam DPA, sedangkan diprioritaskan dalam penggunaan dana adalah: Untuk pengadaan berbagai sarana dan prasarana, serta peningkatan kualitas Kinerja Pegawai melalui kegiatan diklat baik teknis, fungsional maupun kegiatan diklat kepemimpinan”.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Badan Diklat Provinsi Bengkulu selaku Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran yang mengelola dana di dapat penjelasan bahwa, dalam pendanaan Badan Diklat Provinsi Bengkulu tersebut bersumber dari dana APBD. Dana ini merupakan untuk pembiayaan bagi kegiatan di Badan Diklat Provinsi Bengkulu, penggunaannya sesuai proporsi untuk tiap kegiatan, besarnya ditentukan oleh Badan Diklat Provinsi Bengkulu sendiri seperti yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Adapun alur proses administrasi pengalokasian administrasi keuangan di Badan Diklat Provinsi Bengkulu yaitu berdasarkan RKA-KL, Biro Pengelolaan Keuangan menyusun konsep Surat Rincian Alokasi Anggaran (SRAA) untuk penetapan pagu ke dalam alokasi belanja untuk

SKPD Badan Diklat Provinsi Bengkulu. Selanjutnya staf Bagian Perencanaan melakukan penginputan data RKA kedalam aplikasi DPA. Setelah dilakukan penginputan selanjutnya dilaksanakan pembasan konsep DPA dengan Biro Pengelolaan Keuangan, Bappeda Provinsi Bengkulu dan Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Bengkulu. Selanjutnya Kepala Badan menandatangani DPA untuk diserahkan ke Badan Diklat Provinsi Bengkulu sebagai Pedoman Pelaksanaan Anggaran untuk satu tahun anggaran.

Jadi berdasarkan rincian dana di atas pengalokasian dana dari APBD digunakan sebagaimana yang tertuang dalam DPA yang telah ditetapkan, apabila mengalami kekurangan dapat ditambah dari sumber lain, sedangkan apabila program yang dikembangkan tidak memerlukan sebesar biaya dengan proporsi yang telah ditetapkan (kelebihan), maka dapat diusulkan perubahan anggaran melalui pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) ataupun melalui revisi anggaran. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa rencana alokasi penggunaan anggaran tersebut tersebar dalam 8 mata anggaran kegiatan (MAK) dengan perincian sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2013 sebagai berikut :

Tabel 4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Diklat Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013

No	Uraian	Jumlah
1.	Belanja pegawai	6.807.139.567
2.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.329.665.000
3.	Program kegiatan Bidang Sekretariat	225.400.000
4.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	5.361.373.600
5.	Program Pendidikan dan Pelatihan Formal	900.000.000
6.	Kegiatan Bidang Pengembangan Kediklatan	820.355.000
7.	Kegiatan Bidang Diklat Kepemimpinan	1.688.850.000
8.	Kegiatan Diklat Teknis	1.841.000.000
9.	Kegiatan Diklat Fungsional	966.200.000
10.	Kegiatan Diklat Swadana Kabupaten/Kota	3.488.400.000
	Jumlah	16.947.663.600

Sumber data : DPA Badan Diklat Provinsi Bengkulu TA 2013

Rincian penggunaan dana per kegiatan yang didanai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2013 Badan Diklat Provinsi Bengkulu disesuaikan dengan kebutuhan dan yang diajukan oleh Badan Diklat Provinsi Bengkulu. Ketika otonomi keuangan dijalankan maka secara otomatis kebijakan pendapatan seutuhnya dilakukan oleh Badan Diklat Provinsi Bengkulu. Pendapatan yang dimaksud diperoleh dari biaya sewa ruang aula, ruang belajar dan asrama serta pendapatan dari biaya kegiatan diklat itu sendiri.

4. Administrasi Penatausahaan Keuangan pada Badan Diklat Provinsi Bengkulu

Dalam rangka pelaksanaan penatausahaan administrasi keuangan pada Badan Diklat Provinsi Bengkulu seperti yang dijelaskan oleh Kepala Badan Diklat Provinsi Bengkulu selaku pengguna anggaran bahwa :

“Dalam pelaksanaan penatausahaan keuangan di Badan Diklat Provinsi Bengkulu terdiri dari dua yaitu penatausahaan penerimaan dan administrasi penatausahaan pengeluaran. Hal ini disebabkan Badan Diklat Provinsi Bengkulu juga mendapatkan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari penyelenggaraan pendidikan dan sewa ruang aula, kelas dan asrama”.

Secara garis besarnya penatausahaan keuangan pada Badan Diklat Provinsi Bengkulu berdasarkan hasil observasi dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Penatausahaan Penerimaan

Dalam rangka pelaksanaan administrasi penatausahaan penerimaan di Badan Diklat Provinsi Bengkulu, ditunjuk Bendahara Penerimaan yang bertugas menerima dan menyetorkan serta bertanggungjawabkan secara administrasi segala penerimaan yang didapat dari penyelenggaraan kegiatan di Badan Diklat Provinsi Bengkulu ke Kas Daerah di Bank Bengkulu. Bendahara Penerimaan sehari setelah penerimaan akan segera menyetorkan penerimaan PAD ke Bank Bengkulu. Selanjutnya Bendahara Penerimaan menyelenggarakan administrasi penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya. Bendahara Penerimaan membuat Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu per rincian objek penerimaan serta membuat buku rekapitulasi penerimaan. Adapun kelengkapan yang digunakan dalam pelaksanaan penatausahaan penerimaan yaitu Surat Tanda Setoran (STS), Surat tanda bukti pembayaran dan bukti penerimaan lainnya yang sah.

Penerimaan daerah disetor ke rekening kas umum daerah pada bank pemerintah yang ditunjuk dan dianggap sah setelah kuasa BUD

menerima nota kredit. Penerimaan daerah yang disetor tersebut dilakukan dengan cara :

- a. disetor langsung ke bank oleh pihak ketiga;
- b. disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga; dan disetor melalui bendahara penerimaan oleh pihak ketiga.

Administrasi penatausahaan penerimaan Bendahara penerimaan juga wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya. Bendahara penerimaan Badan Diklat Provinsi Bengkulu wajib mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada pengguna anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Disamping pertanggungjawaban secara administratif, Bendahara penerimaan Badan Diklat Provinsi Bengkulu mempertanggung jawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Selanjutnya PPKD selaku BUD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan pada SKPD.

2) Penatausahaan Pengeluaran

Dalam pelaksanaan administrasi penatausahaan pengeluaran di Badan Diklat Provinsi Bengkulu maka yang bertugas dalam pelaksanaannya adalah Bendahara Pengeluaran. Setelah adanya penetapan anggaran Kas SKPD dan telah disahkannya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) maka Bendahara Pengeluaran melaksanakan pengusulan Surat Penyediaan Dana (SPD) dalam rangka pengeluaran Kas yang ditandatangani oleh Kepala Badan Diklat Provinsi Bengkulu selaku Pengguna Anggaran untuk selanjutnya diusulkan ke Biro Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu untuk diproses. Berdasarkan SPD yang telah diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah melalui Biro Pengelolaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang terdiri dari SPP Uang Persediaan, SPP Ganti Uang Persediaan, SPP Tambahan Uang Persediaan dan SPP Langsung. Dalam pengajuannya Bendahara Pengeluaran melampiri dengan Daftar Rincian Rencana Penggunaan Dana sampai dengan jenis belanja. Selanjutnya SPP tersebut diuji oleh Kepala Sub Bagian Keuangan, apabila tidak kesalahan dan SPP dinyatakan lengkap dan sah maka Kepala Badan Diklat Provinsi Bengkulu selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang sebelumnya telah diteliti oleh Sekretaris Badan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan. Selanjutnya SPM yang telah diterbitkan diajukan ke Bendahara Umum Daerah melalui Biro

Pengelolaan Keuangan Daerah untuk dapat diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). SP2D yang telah diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah selanjutnya dipergunakan oleh Bendahara Pengeluaran untuk keperluan Uang Persediaan, ganti uang persediaan, tambahan uang persediaan kepada pengguna anggaran serta pembayaran langsung untuk pihak ketiga. Dalam pelaksanaan penatausahaan administrasi keuangan Bendahara Pengeluaran Badan Diklat Provinsi Bengkulu membuat Buku Kas Umum (BKU), Buku Bank, Buku Pajak, Buku Rekapitulasi Rincian Per Objek dan Buku penunjang lainnya.

5. Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan pada Badan Diklat Provinsi Bengkulu

Dalam rangka pelaksanaan pertanggungjawaban Administrasi Keuangan pada Badan Diklat Provinsi Bengkulu sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Diklat Provinsi Bengkulu sebagai berikut :

“Pertanggungjawaban masing masing dana mengikuti format yang telah ada pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Yang mempertanggungjawabkan untuk masing masing anggaran kegiatan adalah bendahara pengeluaran, bendahara kegiatan serta Pengguna Anggaran. Pertanggungjawaban realisasi anggaran dilaporkan secara berkala yaitu per triwulan, semesteran dan tahunan yang merupakan laporan tahun anggaran. Laporan realisasi anggaran dibuat secara lengkap dilengkapi SPJ yang benar dan lengkap juga. Laporan tersebut dibuat oleh bendahara dan dibantu oleh staf”.

Peneliti juga mendapat keterangan dari Bendahara Pengeluaran yaitu sebagai berikut :

“iya benar, dalam pertanggungjawaban masing masing dana baik itu kegiatan rutin maupun kegiatan di masing masing bidang akan dilaporkan secara berkala sesuai dengan permintaan baik dari Bappeda, Biro Keuangan maupun Inspektorat Provinsi. Biasanya mereka mengirim surat ke dinas dinas untuk mendapatkan laporan mengenai capaian realisasi anggaran masing masing SKPD baik itu triwulan, semesteran maupun akhir tahun anggaran.”

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Sekolah dan Bendahara Badan Diklat Provinsi Bengkulu di atas menunjukkan bahwa proses pertanggungjawaban keuangan SKPD dalam hal ini dana APBD sudah mengikuti petunjuk yang ada sehingga pelaksanaannya dapat dipantau dan dievaluasi setiap saat.

Administrasi pertanggungjawaban keuangan pada Badan Diklat Provinsi Bengkulu yaitu Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggung jawabkan penggunaan uang persediaan/ ganti uang persediaan/ tambah uang persediaan kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Hal ini dilaksanakan dengan menutup Buku Kas Umum setiap bulan dengan persetujuan pengguna anggaran. Selanjutnya Bendahara Pengeluaran menyusun laporan pertanggung jawaban penggunaan uang persediaan. Dalam hal laporan pertanggungjawaban telah sesuai, pengguna anggaran menerbitkan surat pengesahan laporan pertanggungjawaban. Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember.

Disamping pertanggungjawaban secara administratif, Bendahara Pengeluaran pada SKPD juga wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Penyampaian pertanggungjawaban tersebut dilaksanakan setelah diterbitkan surat pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

Proses pertanggungjawaban dimulai dengan penggunaan dana sesuai dengan petunjuk yang ada pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Setiap pengeluaran dilampiri dengan kwitansi, dan dokumen pendukung baik surat pesanan, berita acara serah terima barang, maupun nota pembelian barang. Kemudian bendahara pengeluaran mencatat pada Buku Kas Umum (BKU) dan Buku pembantu kas tunai. Setiap akhir bulan buku kas umum, buku pembantu kas tunai dan buku pendukung lainnya ditutup dan diketahui oleh Kepala Badan selaku Pengguna Anggaran.

Bentuk pertanggungjawaban masing masing dana adalah berupa laporan lengkap yang berisi penerimaan dan pengeluaran penggunaan dana yang dilampiri SPJ yang benar dan lengkap yang dibuat oleh Bendahara dan diketahui oleh Kepala Badan selaku Pengguna Anggaran. Untuk laporan dana APBD per triwulan dilaporkan ke Biro Pengelelolaan Keuangan, Bappeda Provinsi Bengkulu serta Inspektorat Provinsi.

Sedangkan untuk penerimaan dilaporkan ke Dinas Pendapatan Daerah Provinsi selaku instansi yang menangani Pendapatan Daerah Provinsi.

Berdasarkan hasil observasi juga diketahui bahwa baik Bendahara Penerimaan maupun Bendahara Pengeluaran dalam pertanggungjawaban administrasi keuangan menggunakan Buku Kas Umum sebagai pedoman dalam rangka penyusunan SPJ pertanggungjawaban.

6. Administrasi Pengawasan Keuangan pada Badan Diklat Provinsi Bengkulu

Administrasi keuangan seperti yang telah dijelaskan adalah suatu kegiatan pengelolaan keuangan secara tertib, sah, hemat, berdaya guna dan berhasil.yang meliputi kegiatan pengelolaan penerimaan, sumber penerimaan, dan pembelanjaan dalam rangka mencapai tujuan tujuan tertentu. Untuk melakukan itu diperlukan adanya pengawasan baik secara intern maupun ekstern supaya tidak terjadi penyimpangan atau kesalahan pelaksanaan kegiatan dan agar sejauh mungkin mencegah terjadinya pemborosan, kebocoran, penyimpangan dalam penggunaan wewenang, tenaga, uang, dan perlengkapan milik perusahaan atau instansi tersebut.

Dengan demikian hubungan administrasi keuangan dengan pengawasan intern pada bagian keuangan memiliki hubungan yang sangat penting, dimana dalam pengawasan harus dilakukan harus sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan untuk mencapai hasil yang baik.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara dengan Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Diklat Provinsi Bengkulu dijelaskan sebagai berikut :

“Selama ini pengawasan yang dilakukan dalam rangka pengelolaan administrasi keuangan di Badan Diklat Provinsi Bengkulu yaitu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Bengkulu, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Bengkulu”

Lebih lanjut hal ini juga dijelaskan oleh Kepala Badan Diklat

Provinsi Bengkulu :

“Pelaksanaan administrasi keuangan selama ini baru sebatas pemeriksaan rutin yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Bengkulu, biasanya mereka datang ke masing-masing SKPD dengan Tim yang berbeda beda dan pelaksanaannya juga selama ini pada semester pertama dan pada akhir tahun. Ada juga pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, namun biasanya mereka tidak rutin untuk memeriksa. Yang terakhir juga yang tiap tahun diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang tiap tahun anggaran senantiasa memeriksa realisasi pelaksanaan administrasi keuangan pada masing masing SKPD”.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti ke Badan Diklat Provinsi Bengkulu juga diketahui bahwa pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka pelaksanaan administrasi pengawasan pengelolaan keuangan juga rutin dilaksanakan baik yang dilakukan oleh pihak internal yaitu Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri maupun pengawasan yang dilakukan oleh pihak eksternal yaitu pemeriksaan rutin setiap tahun anggaran terhadap pelaksanaan administrasi keuangan di masing masing SKPD termasuk didalamnya Badan Diklat Provinsi Bengkulu yaitu dengan memeriksa buku kas umum, buku pembantu, serta kelengkapan SPJ kegiatan. Selanjutnya masing-masing bendahara membuat format pemeriksaan reguler untuk masing-masing kegiatan yang dipegang oleh bendahara.

B. Pembahasan

1. Sumber Dana Keuangan pada Badan Diklat Provinsi Bengkulu

Seperti disampaikan dalam hasil penelitian bahwa Badan Diklat Provinsi Bengkulu memiliki sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam pelaksanaannya anggaran tersebut dibagi menjadi anggaran belanja langsung dan anggaran belanja tidak langsung. Anggaran belanja langsung dipergunakan untuk membiayai kegiatan baik operasional kantor maupun kegiatan untuk masing masing bidang dalam satu tahun anggaran. Sedangkan belanja tidak langsung dipergunakan untuk pembayaran gaji pegawai, tunjangan, uang makan dan beban kerja.

Dana yang diperoleh kemudian diinvestasikan pada berbagai aktivitas instansi, untuk mendanai kegiatan instansi. Kebutuhan dana jelas digunakan untuk menjalankan operasi instansi antara lain untuk dibelanjakan pada pembelian alat tulis kantor, listrik, kegiatan operasional dan sebagainya. Dengan mengelola dana yang baik pada akhirnya menuju tujuan utama dari manajemen keuangan yaitu memaksimalkan kinerja suatu instansi. Dana dapat diartikan berbagai macam diantaranya: Menurut Sofyan Syafari Harahap (1995:122) (1) dana adalah kas, (2) dana adalah aktiva cepat, (3) dana adalah monetary asset, (4) dana adalah aktiva lancar, (5) dana adalah modal kerja (aktiva lancar dikurangi hutang lancar), (6) dana diartikan sebagai keseluruhan aktiva. Sedangkan Munawir (1999:113) “ menyatakan bahwa dana/fund sebagai modal kerja

bruto atau netto, dana sebagai kas, dana sebagai net monetary asset yaitu kas dan aktiva lain yang mempunyai sifat sama dengan kas.”

2. Administrasi Perencanaan keuangan pada Badan Diklat Provinsi Bengkulu

Administrasi perencanaan keuangan pada Badan Diklat Provinsi Bengkulu telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk dan pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Namun dalam pelaksanaannya masih belum melibatkan semua aspek yang berkompeten dan hanya terbatas pada unsur pimpinan saja. Disamping itu dalam penyusunan perencanaan masih sering terlambat dan tidak tepat waktu.

Hal ini disebabkan terbatasnya SDM yang ada dan jadwal waktu pelaksanaan yang sering berubah ubah. Idealnya suatu rencana harus dirancang dan disusun melibatkan SDM yang cukup dan profesional dan penggunaan waktu yang seefektif dan seoptimal mungkin. Dalam perencanaan administrasi keuangan pada Badan Diklat Provinsi Bengkulu disusun menjadi dua item kegiatan yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Menurut Abu Bakar (2008:44), pelaksanaan biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal dalam pengelolaan keuangan memerlukan adanya proses perencanaan, organisasi dan koordinasi, pelaksanaan pengawasan dan pelaporan kegiatan bidang keuangan agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Untuk itu perencanaan keuangan mutlak diperlukan, begitu juga perencanaan administrasi keuangan yang

dilakukan oleh Badan Diklat Provinsi Bengkulu selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu.

Administrasi perencanaan keuangan pada dasarnya merupakan implementasi program dan kegiatan yang diterjemahkan ke dalam aspek-aspek yang diperlukan. Kenyataannya tidak semua kebutuhan dapat direalisasikan secara utuh, salah satu faktor penting yang menonjol dalam perencanaan administrasi keuangan adalah terbatasnya anggaran dan banyaknya kepentingan dalam penyediaan anggaran.

Kesulitan yang sering dihadapi para perencana keuangan antara lain, kurang lengkapnya data dan informasi yang diperlukan seperti kebutuhan fisik secara riil, perkiraan harga untuk tahun yang akan datang serta jadwal serta aturan dalam pelaksanaan penyusunan anggaran yang sering berubah ubah.

3. Administrasi Pengalokasian Keuangan pada Badan Diklat Provinsi Bengkulu

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam administrasi pengalokasian keuangan pada Badan Diklat Provinsi Bengkulu telah dilaksanakan sesuai aturan yang telah ditetapkan. Secara garis besar administrasi pengalokasian keuangan di Badan Diklat Provinsi Bengkulu dibagi menjadi alokasi administrasi keuangan untuk Anggaran Belanja Langsung dan alokasi administrasi keuangan untuk anggaran belanja tidak langsung. Hal ini sejalan dengan pendapat Freeman (2003:22) alokasi anggaran keuangan adalah sebuah proses yang dilakukan oleh sektor

publik untuk mengalokasikan sumber dana untuk kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas.

Pendapat lain juga dikemukakan oleh M. Nafarin (2004:12), Anggaran merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu”. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Mulyadi (2004:14), anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka yang dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu (periode) tertentu dimasa depan

Alokasi untuk anggaran Belanja Langsung terdiri dari anggaran belanja rutin Badan Diklat seperti belanja Alat Tulis Kantor, Biaya Telepon dan Internet, Belanja Surat Kabar, Belanja Perjalanan Dinas serta belanja lainnya dan Belanja kegiatan di masing masing bidang yang berupa kegiatan diklat baik Diklat Fungsional, Teknis, Kepemimpinan serta kegiatan bidang Pengembangan Kediklatan. Alokasi administrasi keuangan juga di bagi untuk anggaran Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal yang besarnya telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Diklat.

Untuk alokasi keuangan untuk anggaran belanja tidak langsung terdiri dari untuk Gaji Pegawai, Tunjangan Fungsional, Tunjangan Widyaiswara, Rapel Gaji, Pembayaran Uang Makan Pegawai serta Tunjangan atas Beban Kerja Pegawai. Dalam pelaksanaanya telah

dilaksanakan sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan baik oleh Peraturan Perundang-Undangan maupun kebijakan dari Biro Pengelolaan Keuangan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu.

4. Administrasi Penatausahaan Keuangan pada Badan Diklat Provinsi Bengkulu

Berdasarkan hasil penelitian diketahui mengenai tata cara atau prosedur pelaksanaan sistem penatausahaan keuangan daerah, yaitu Bendaharawan dalam pelaksanaan administrasi penatausahaan keuangan melaksanakan tahapan kegiatan meliputi : 1) Mempersiapkan buku-buku untuk pencatatan kegiatan pelaksanaan anggaran belanja 2) Pencatatan dalam Buku Kas Umum dan Buku Kepala/Buku Pembantu 3) Pengolahan tanda-tanda bukti untuk menyusun Surat Pertanggungjawaban 4) Penyimpanan uang dan dokumen-dokumen.

Hal ini sejalan dengan definisi pengelolaan keuangan menurut www.seknasfitra.org yaitu : “Pengelolaan keuangan adalah tindakan administratif yang berhubungan dengan kegiatan perencanaan anggaran, penyimpanan, penggunaan, pencatatan dan pengawasan keluar masuknya uang/dana organisasi”.

Hal ini juga tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa penatausahaan keuangan daerah mencakup hal-hal sebagai berikut: (a) asas umum penatausahaan keuangan daerah; (b) pelaksanaan

penatausahaan keuangan daerah; (c) penatausahaan penerimaan; dan (d) penatausahaan pengeluaran.

Jadi peranan penatausahaan keuangan daerah dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan APBD di Badan Diklat Provinsi Bengkulu adalah untuk melihat perkembangan volume kegiatan baik beban Anggaran Rutin maupun Anggaran Pembangunan dari tahun ke tahun dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah semakin baik.

Pelaksanaan APBD yang diwujudkan dalam pengurusan administrasi dan pengurusan bendaharawan akan mengakibatkan adanya arus dokumen, arus barang dan arus uang. Dengan adanya arus dokumen, arus barang dan arus uang inilah perlu adanya penatausahaan keuangan.

5. Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan pada Badan Diklat Provinsi Bengkulu

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa administrasi pertanggung jawaban pelaksanaan keuangan di Badan Diklat Provinsi Bengkulu sudah sesuai dengan persyaratan responsible, akuntabel dan transparan dari semua aspek-aspek penerimaan dan pengeluaran keuangan dan semua bukti administrasi keuangan APBD sudah di buat pertanggungjawaban dan dilaporkan oleh bendahara kepada biro Pengelolaan Keuangan Setda Provinsi. Pertanggungjawaban semua penerimaan dan pengeluaran serta bukti-bukti administrasi dilaporkan oleh bendahara kepada Setda Provinsi. Berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara SPKD Badan Diklat bahwa jika terjadi sisa dalam pemakaian dana maka dana tersebut dikembalikan ke kas Negara karena

terjadi adanya keterlambatan pencairan dana sehingga sulit diimplementasikan.

Pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dan bukti-bukti administrasi dari hasil wawancara dengan bendahara pengeluaran Badan Diklat Provinsi Bengkulu didapatkan penjelasan bahwa laporan sudah dibuat dan dilaporkan kepada Biro pengelolaan Keuangan Setda Provinsi yaitu kepala dan bendahara Setda setiap bulan sekali secara berkala dan diketahui oleh Kepala Badan Diklat Provinsi. Laporan pertanggungjawaban untuk penerimaan dan pengeluaran dalam satu tahun dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada Kepala Badan Diklat, Bendahara, Kasubag Keuangan dan PPK setiap awal tahun.

Administrasi pertanggungjawaban keuangan pada Badan Diklat Provinsi Bengkulu sudah dilakukan, setiap penerimaan maupun pengeluaran perlu dipertanggungjawabkan baik secara internal maupun secara eksternal. Setiap penggunaan anggaran sekecil apapun harus dipertanggung jawabkan. Karena setiap pengeluaran harus sesuai dengan plofon mata anggaran yang telah ditetapkan, setiap satuan aparatur dalam penyusunan anggaran dengan asas pembiayaan yang telah ditentukan untuk mempermudah instansi dalam mempertanggungjawabkan anggaran.

Pertanggungjawaban/akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksana misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang

dilaksanakan selama ini secara preodik (Tanbury: 2003:28) dalam <http://www.bppk.depkeu.go.id>. Hal ini bahwa setiap pengelolaan pembiayaan haruslah memenuhi persyaratan responsible, akuntabel, dan transparan. Menurut Harsono (2007: 89) responsible artinya bahwa semua hal ikhwal yang berkaitan dengan penerimaan sumber dana dan pemanfaatan dana, serta pengelolaan bukti administrasi keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan, pengelolaan yang akuntabel merupakan kondisi dimana setiap aspek pengelolaan dana (penerimaan dan pengeluaran, dan administrasinya) dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum, sedangkan transparan terjadi manakala aspek-aspek administrasi dan pengelolaan dan dapat diketahui oleh pihak-pihak terkait.

6. Administrasi Pengawasan Keuangan pada Badan Diklat Provinsi Bengkulu

Administrasi pengawasan dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan terhadap penerimaan dan pengeluaran sumber-sumber dana yang terjadi selama ini di Badan Diklat Provinsi Bengkulu sudah dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan pendapat Fattah (2006: 65) pengawasan keuangan bertujuan untuk mengukur, membandingkan, menilai alokasi biaya dan tingkat penggunaannya. Jadi pengawasan yang dilakukan untuk mengukur, membandingkan dan menilai alokasi biaya dan tingkat penggunaan sumber-sumber dana apakah sudah sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku.

Pengawasan Administrasi Keuangan pada Badan Diklat Provinsi Bengkulu: a) Bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan, pemeriksaan

keuangan dan dilakukan pemeriksaan pelaksanaan kegiatan oleh aparat yang berwenang. Bentuk pemeriksaan tersebut meliputi: Pemeriksaan sebelum uang digunakan, pemeriksaan setelah uang digunakan. b) Pemeriksaan dilakukan terhadap bendaharawan yang bertugas menerima, menyimpan, membukuan, mengeluarkan uang dan membuat suatu pertanggungjawaban. c) Pemeriksaan pada bendaharawan berarti juga pemeriksaan kepada atasan atau pimpinan proyek yang menjadi atasannya dalam kegiatan pembangunan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dilihat betapa kelirunya bila ada yang menganggap bahwa kegiatan pengawasan sebagai kegiatan yang semata-mata bertujuan mencari kesalahan. Pengawasan adalah kegiatan penilaian terhadap suatu kegiatan, dengan tujuan agar pelaksanaan kegiatan itu sesuai dengan rencana yang telah digariskan, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Salah satu aspek pengawasan adalah pelaksanaan pemeriksaan. Pelaksanaan pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah pelaksanaan kegiatan yang sesungguhnya telah sesuai dengan yang seharusnya. Dengan demikian penekanannya lebih pada upaya untuk mengenali penyimpangan atau hambatan di dalam pelaksanaan kegiatan itu.

Menurut Revrisond Baswir (1999:34) tujuan pengawasan pada dasarnya adalah untuk mengamati apa yang sungguh-sungguh terjadi serta membandingkannya dengan apa yang seharusnya. Bila ternyata kemudian ditemukan adanya penyimpangan atau hambatan, maka diharapkan akan

segera dikenali untuk dilakukan koreksi. Melalui tindakan koreksi ini, maka pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan diharapkan masih dapat mencapai tujuannya secara maksimal. Sedangkan pengawasan atas keuangan negara secara garis besar dibedakan menjadi 2 macam yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal.

Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang berasal dan lingkungan internal organisasi pemerintah. Dalam tatanan organisasi pemerintahan Indonesia, pelaksana fungsi ini pada tingkat pemerintahan daerah adalah Inspektorat Provinsi Bengkulu. Sedangkan pengawasan internal yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang berasal dan lembaga khusus pengawasan yang dibentuk secara internal oleh pemerintah atau lembaga eksekutif adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Menurut Revrisond Baswir (1999:33) pengawasan eksternal adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh suatu unit pengawasan yang sama sekali berasal dan luar lingkungan organisasi eksekutif. Dengan demikian, dalam pengawasan eksternal ini, antara pengawas dengan pihak yang diawasi tidak terdapat lagi hubungan kedinasan. Pengawasan eksternal ini, antara lain diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan secara langsung oleh masyarakat.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa dalam hal pengawasan administrasi keuangan di Badan Diklat Provinsi Bengkulu yang bersumber dari anggaran APBD yaitu pengawasan

dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Bengkulu, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri maupun pengawasan dari lingkungan eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan, sebagai pengawasan terhadap keuangan Negara telah dilaksanakan dengan baik. Pengawasan dilakukan setahun sekali atau bisa dua kali dalam setahun bila terjadi ada hal-hal yang kurang tepat dalam perhitungan.

Pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi keuangan terhadap penerimaan dan pengeluaran dilakukan oleh Bagian Anggaran Biro Pengelolaan Keuangan Setda Provinsi, BAPPEDA, dan Bagian Perencanaan Program Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi. Pengawasan dilakukan per triwulan, semester maupun satu tahun sekali.

C. Keterbatasan Penelitian

Ada beberapa hal yang membatasi hasil-hasil penelitian ini yaitu 1). Penelitian ini dibatasi waktu yang dilaksanakan mulai tanggal 1 April sampai dengan 31 Mei 2013, dengan demikian data yang diperoleh juga merupakan cerminan pada saat penelitian dilaksanakan. Jika penelitian pada waktu yang lain dimana keadaan sudah banyak berubah, kemungkinan akan memberikan hasil yang berbeda, 2) dilaksanakan pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Bengkulu, dengan demikian membatasi keluasan daerah generalisasi, 3) Penelitian ini sebagai penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan instrumen manusia yaitu peneliti itu sendiri. Keterbatasan instrumen jenis ini adalah untuk menuntut kesungguhan dan waktu yang banyak dari peneliti.

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Simpulan

Kesimpulan umum penelitian ini menunjukkan bahwa administrasi keuangan pada Badan Diklat Provinsi Bengkulu dilakukan melalui proses perencanaan, pengalokasian, penatausahaan, pertanggungjawaban serta pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sedangkan kesimpulan secara khusus dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pertama, Sumber dana yang digunakan untuk kegiatan di Badan Diklat Provinsi Bengkulu adalah dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang disusun per satu tahun anggaran. Sedangkan Penerimaan Badan Diklat Provinsi Bengkulu berasal dari Pendapatan daerah yang terdiri dari biaya penyelenggaraan diklat dari Kabupaten/Kota serta biaya sewa ruang belajar, ruang aula dan asrama.

Kedua, Perencanaan Administrasi Keuangan di Badan Diklat Provinsi Bengkulu, Kegiatan Administrasi Keuangan sudah sesuai dengan yang dicantumkan dalam SPD dan dilaksanakan baik oleh instansi yang bersangkutan maupun melalui pihak ketiga. Setelah kegiatan dilaksanakan dapat dilakukan penagihan kepada Negara sesuai dengan dana yang tersedia, Kegiatan bendaharawan dalam administrasi keuangan tata usaha keuangan sudah diwujudkan berupa penerimaan, penyimpanan dan pertanggung jawaban dalam administrasi keuangan.

Ketiga, Administrasi pengalokasian Keuangan di Badan Diklat Provinsi Bengkulu tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Pengalokasian untuk masing masing item dalam DPA sesuai dengan proporsi yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Tetapi dilapangan masih sering terjadi adanya pengalihan pengalokasian dana, disebabkan adanya keterlambatan pencairan dana sedangkan program harus terlaksana.

Keempat, Administrasi Penatausahaan Keuangan Dalam rangka penatausahaan penerimaan di Badan Diklat Provinsi Bengkulu, ditunjuk Bendahara Penerimaan yang bertugas menerima dan menyetorkan serta mempertanggungjawabkan secara administrasi segala penerimaan yang didapat dari penyelenggaraan kegiatan di Badan Diklat Provinsi Bengkulu ke Kas Daerah di Bank Bengkulu. Bendahara Penerimaan sehari setelah penerimaan akan segera menyetorkan penerimaan PAD ke Bank Bengkulu. Selanjutnya Bendahara Penerimaan menyelenggarakan administrasi penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya. Bendahara Penerimaan membuat Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu per rincian objek penerimaan serta membuat buku rekapitulasi penerimaan. Adapun kelengkapan yang digunakan dalam pelaksanaan penatausahaan penerimaan yaitu Surat Tanda Setoran (STS), Surat tanda bukti pembayaran dan bukti penerimaan lainnya yang sah.

Dalam penatausahaan pengeluaran di Badan Diklat Provinsi Bengkulu maka yang bertugas dalam pelaksanaannya adalah Bendahara Pengeluaran. Setelah adanya penetapan anggaran Kas SKPD dan telah disahkannya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) maka Bendahara Pengeluaran melaksanakan pengusulan Surat Penyediaan Dana (SPD) dalam rangka

pengeluaran Kas yang ditandatangani oleh Kepala Badan Diklat Provinsi Bengkulu selaku Pengguna Anggaran untuk selanjutnya diusulkan ke Biro Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu untuk diproses. Berdasarkan SPD yang telah diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah melalui Biro Pengelolaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang terdiri dari SPP Uang Persediaan, SPP Ganti Uang Persediaan, SPP Tambahan Uang Persediaan dan SPP Langsung. Dalam pengajuannya Bendahara Pengeluaran melampiri dengan Daftar Rincian Rencana Penggunaan Dana sampai dengan jenis belanja. Setelah SPP dinyatakan lengkap dan sah maka Kepala Badan Diklat Provinsi Bengkulu selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM). Selanjutnya SPM yang telah diterbitkan diajukan ke Bendahara Umum Daerah melalui Biro Pengelolaan Keuangan Daerah untuk dapat diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). SP2D yang telah diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah selanjutnya dipergunakan oleh Bendahara Pengeluaran untuk keperluan Uang Persediaan, ganti uang persediaan, tambahan uang persediaan kepada pengguna anggaran serta pembayaran langsung untuk pihak ketiga. Dalam pelaksanaan penatausahaan administrasi keuangan Bendahara Pengeluaran Badan Diklat Provinsi Bengkulu membuat Buku Kas Umum (BKU), Buku Bank, Buku Pajak, Buku Rekapitulasi Rincian Per Objek dan Buku penunjang lainnya

Kelima, Administrasi Pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran di Badan Diklat Provinsi Bengkulu telah dibuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dan dilaporkan kepada Biro pengelolaan Keuangan Setda Provinsi oleh bendahara penerimaan dan

pengeluaran setiap bulan sekali secara berkala dan diketahui oleh Kepala Badan Diklat Provinsi. Laporan pertanggungjawaban untuk penerimaan dan pengeluaran dalam satu tahun dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada Kepala Badan Diklat, Bendahara, Kasubag Keuangan dan PPK setiap awal tahun.

Keenam, kegiatan Pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi keuangan di Badan Diklat Provinsi Bengkulu terhadap penerimaan dan pengeluaran dilakukan oleh Bagian Anggaran Biro Pengelolaam Keuangan Setda Provinsi, BAPPEDA, dan Bagian Perencanaan Program Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi. Pengawasan dilakukan per triwulan, semester maupun satu tahun sekali.

B. Implikasi

Dari pelaksanaan penelitian yang peneliti lakukan ada hal-hal yang dapat diterapkan adalah (1) Penggalian sumber-sumber dana dalam pengelolaan administrasi keuangan selain anggaran dari APBD di Badan Diklat Provinsi Bengkulu misalnya dengan mengusulkan anggaran dari Pusat (APBN), (2) Perencanaan kegiatan administrasi keuangan sudah direncanakan dengan baik, maka suatu kegiatan akan berjalan dengan sukses. Perencanaan yang dimaksud adalah perencanaan dalam pengelolaan administrasi keuangan di Diklat Provinsi Bengkulu (3) Pengalokasian administrasi keuangan dialokasikan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Setiap penerimaan maupun pengeluaran diidentifikasi untuk dialokasikan keperuntukannya dalam DPA dan proporsi yang telah ditetapkan, hal ini diyakini untuk meningkatkan konsistensi dalam

penggunaan keuangan program pengembangan Badan Diklat, (4) Penatausahaan administrasi keuangan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan APBD di Badan Diklat Provinsi Bengkulu adalah untuk melihat perkembangan volume kegiatan baik beban Anggaran Rutin maupun Anggaran Pembangunan dari tahun ke tahun dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah semakin baik, (5) Pertanggungjawaban dilaksanakan oleh Bendahara baik penerimaan maupun pengeluaran dalam bentuk laporan pertanggungjawaban sehingga diketahui realisasi pelaksanaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan di Badan Diklat Provinsi Bengkulu (6) Pengawasan/monitoring yang dilakukan baik secara internal maupun eksternal oleh institusi terkait, sebagai wujud kontrol dalam pembiayaan administrasi keuangan di Badan Diklat. Kritik dan saran dari hasil Pengawasan sebagai pedoman dan motivasi bagi Badan Diklat Provinsi Bengkulu dalam pelaksanaan administrasi keuangan di masa yang akan datang akan menjadi semakin baik.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan kepada Badan Diklat Provinsi Bengkulu bahwa:

1. Diharapkan kepada Badan Diklat Provinsi Bengkulu untuk dapat memaksimalkan kegiatan Diklat Kabupaten/Kota (Swadana) dan retribusi dari jasa usaha dari sewa ruang belajar, ruang kelas dan aula sehingga dapat memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi bagi Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu.

2. Diharapkan untuk meningkatkan pengelolaan administrasi keuangan di Badan Diklat Provinsi Bengkulu tidak hanya melaksanakan anggaran yang bersumber dari APBD namun juga dapat mengusulkan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
3. Dalam Perencanaan administrasi Keuangan di Badan Diklat Provinsi Bengkulu hendaknya melibatkan semua unsur mulai dari Pengguna Anggaran, Kepala Bidang hingga staf sehingga anggaran yang ada bisa di alokasikan sesuai dengan berdasarkan kebutuhan skala prioritas serta masukan dari berbagai pihak.
4. Pertanggungjawaban administrasi keuangan sudah yang dilaksanakan Badan Diklat Provinsi Bengkulu dengan baik, namun kedepannya diharapkan Badan Diklat Bengkulu dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuan Bendahara baik melalui Bimbingan Teknis ataupun pelatihan yang berhubungan dengan pengelolaan administrasi keuangan sehingga dalam mempertanggungjawabkan administrasi keuangan akan semakin baik untuk menghindari adanya kesalahan administrasi SPJ keuangan, penyimpangan penggunaan dana, serta untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap institusi.
5. Diharapkan adanya pengawasan tidak hanya dari Badan pemeriksa seperti Inspektorat Provinsi, Irjen atau BPK tetapi juga harus ada pengawasan melekat dari masing masing bidang/bagian yang mengelola administrasi keuangan sehingga akan meminimalisir kesalahan dalam pengelolaan administrasi keuangan di Badan Diklat Provinsi Bengkulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2001. *Peningkatan kualitas penyelenggaraan keuangan daerah*. Bandung: Pustaka Setia
- Abu Bakar. 2008. *Strategi Dalam Pengelolaan Keuangan Negara*. Bandung: Alfabeta
- Ali Mufiz, 2004. *Pengantar Ilmu Administrasi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Anwar, Idochi, Moch, H. 2003. *Administrasi Pendidikan dan Biaya Pendidikan (Teori Konsep dan Isu)*. Bandung: Alfabeta CV.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian (Edisi Revisi V)*. PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Asyari, 1983. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya : Usaha Nasional.
- Beni Aswan. 2008. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan; Studi Deskriptif Kualitatif tentang Manajemen Pembiayaan Pendidikan di Akademi Kebidanan Manna Bengkulu Selatan:Program Studi MMP Universitas Bengkulu*.
- Bogdan dan Taylor. 1992. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Usaha Nasional Surabaya.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Dedy & Dadang. 2001. *Pelaksanaan Pengawasan Anggaran*. Jakarta: Balitbang Depdiknas
- Depdiknas, 2006. *Pengkajian Pembiayaan Pendidikan Dari Masa ke Masa*. Jakarta: Pusat Statistik Pendidikan.
- Devas. 1989. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Rhenika Cipta.
- D.J. Mamesah. 2002. *Ilmu Administrasi Keuangan*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Elix A. Nigro & Lloyd G. Nigro, 1977. *Dasar-Dasar Ilmu Administrasi*. Yogyakarta: Liberty
- Fattah, Nanang. 2004. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Freeman, 2003. *Pengelolaan Keuangan Negara*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Fuad;dkk, 2003. *Pengantar Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- G.R. Terry 1982. *Konsep Ilmu Manajemen*, Bandung, Pustaka Setia
- Hallal, J. 1985. *Analisis Biaya dan Pengeluaran Untuk Pendidikan*. (Terjemahan Harso), Paris. UNSECO (Buku asli terbitan tahun 1996).
- Harsono. 2007. *Strategi Dalam Pengelolaan Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Hasan & Pudjiastuti. 1998. *Pengelolaan Administrasi Keuangan yang efektif*. Jakarta: Rhenika Cipta
- Hawa Widjaja. Prof, Drs, 2001. *Kajian Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah*. Pusat Antar Universitas Ilmu Sosial UI, Jakarta
- Husnan, Suad dan Pudjiastuti, Enny. 2004. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Ibrahim Lubis, 1985. *Manajemen pengawasan pengelolaan keuangan perusahaan*, Jakarta Rineka Cipta.
- Malo, Manasse dan Trisnoningias, Sri. 1999. *Metode Penelitian Masyarakat*. Pusat Antar Universitas Ilmu Sosial UI, Jakarta.
- Mardiasmo, 2002. *Pengelolaan Pengawasan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty
- Margono. 2007. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT. Renika Cipta.
- McMahon, W.W, Suryani, N, Boediono & Apiyah, E. 2002. *Memperbaiki Keuangan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Balitbang Depdiknas.
- Moleong, J Lexy. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Mulyadi. 2004, *Dasar-Dasar pengelolaan keuangan*. Rineka. Jakarta
- Mulyawan, E. 2005. *Manajemen Keuangan Daerah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Manajemen.Nasution. 2006. *Metode Research*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Nasution, S. 1992. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta, Penerbit Bumi Aksara.
- Ordway Tead, 1953. *Administration Public.*: Liberty Press.

- Refrisond Baswir. 1999. *Dasar-Dasar Pengawasan*. Pusat Antar Universitas Ilmu Sosial UI, Jakarta.
- Riduwan 2008. *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*. Bandung : Alfabeta
- Sagala, Syaiful. 2007. *Strategi Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sofyan Syafari H. 1995. *Pengelolaan Anggaran Negara*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sondang P. Siagian. 1994. *Dasar-Dasar Administrasi*. Pusat Antar Universitas Ilmu Sosial UI, Jakarta.
- Sugiyono, 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. 2004, *Dasar-Dasar Supervisi*. Rineka. Jakarta
- Syarifudin, 2005. *Pengelolaan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty.
- Tanbury. 2003. *Dasar-Dasar Akuntansi Keuangan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Tjahjanulin Domai. 2002. *Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif*. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Widjaja. 2001. *Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Wisnuwardani, Dorajatun, Josephine. 2009. *Sistem Pembiayaan Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu menengah Atas Negeri*. Tesis tidak diterbitkan. Bengkulu: Pascasarjana Universitas Bengkulu.
- Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
- Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- <http://www.bppk.depkeu.go.id/index.php/2008050577/>. budi waluyo, jurnal-akuntan.
- [http://asrivixel.blogspot.com/2009/2/ asri ahmad, pembiayaan pendidikan.html](http://asrivixel.blogspot.com/2009/2/asri%20ahmad,%20pembayaan%20pendidikan.html)
- [http://seknasfitra.org/2011/2/ suwarno, pengelolaan keuangan.html](http://seknasfitra.org/2011/2/suwarno,%20pengelolaan%20keuangan.html)

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran 1 kisi-kisi Instrumen penelitian

**ADMINISTRASI KEUANGAN DI BADAN DIKLAT
PROVINSI BENGKULU
KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN**

NO	PERMASALAHAN	VARIABEL	INDIKATOR	RESPONDEN
1	Apa saja Sumber-sumber dana Badan Diklat Provinsi Bengkulu	Sumber-sumber dana	Mengidentifikasi sumber-sumber dana Badan Diklat Provinsi Bengkulu	Kepala Badan Diklat Bengkulu Bendahara Kasubag Keuangan, PPK (pejabat Penata Keuangan), Pegawai Badan Diklat
2	Bagaimanakah pengalokasian Administrasi Keuangan Badan Diklat Provinsi Bengkulu	Pengalokasian administrasi keuangan	Pengalokasian administrasi keuangan Badan Diklat Provinsi Bengkulu pembiayaan yang di anggarkan	Kepala Badan Diklat Provinsi Bengkulu Bendahara Badan Diklat Kasubag Keuangan Badan Diklat
3	Bagaimana Perencanaan Administrasi keuangan di Badan Diklat Provinsi Bengkulu	Perencanaan administrasi keuangan	Perencanaan administrasi keuangan Badan Diklat Provinsi Bengkulu	Kepala Badan Diklat provinsi Bengkulu Bendahara Badan Diklat
4.	Bagaimanakah Penatausahaan administrasi keuangan di Badan Diklat Provinsi Bengkulu	Penatausahaan administrasi keuangan	Penatausahaan administrasi keuangan Badan Diklat Provinsi Bengkulu	Kepala Badan Diklat provinsi Bengkulu Bendahara Penerimaan/Pengeluaran Badan Diklat provinsi Bengkulu
5	Bagaimanakah pertanggungjawaban administrasi keuangan Badan Diklat provinsi Bengkulu	Pertanggungjawaban administrasi keuangan	Pertanggungjawaban Penggunaan dana - Penerimaan - Penyimpanan - Pembayaran	Kepala Badan Diklat provinsi Bengkulu Bendahara Badan Diklat provinsi Bengkulu
6	Bagaimanakah pengawasan administrasi keuangan di Badan Diklat Provinsi Bengkulu	Pengawasan administrasi keuangan	- Pengawasan Administrasi keuangan - Inspektorat - Irjen Kemendagri - BPK	Kepala Badan Diklat Provinsi Bengkulu Kasubbag Keuangan Bendahara Pengeluaran

Lampiran 2

Daftar Pertanyaan

Nama Responden :

Jabatan :

1. Sejak kapankah Badan Diklat ini Berdiri?
2. Untuk kelangsungan program ini tentu diperlukan dana yang besar, dari manakah sumber- sumber dana Keuangan di Badan Diklat?
3. Apakah sumber-sumber dana tersebut semuanya terealisasi?
4. Bagaimana mengatasi jika salah satu sumber dana Keuangan tidak dapat terpenuhi?
5. Dapatkah bapak menyebutkan berapa jumlah masing-masing sumber dana tersebut?
6. Apakah pengalokasian dana keuangan di Badan Diklat Provinsi Bengkulu?
7. Apakah mekanisme pengalokasian administrasi keuangan Badan Diklat Provinsi Bengkulu?
8. Program/kegiatan Diklat yang manakah mendapatkan prioritas alokasi anggaran Badan Diklat Provinsi Bengkulu?
9. Bagaimanakah Perencanaan administrasi keuangan di Badan Diklat Provinsi Bengkulu?
10. Apa sajakah yang dapat diperoleh dari adanya perencanaan administrasi keuangan di Badan Diklat Provinsi Bengkulu?

11. Apakah ada kesenjangan dalam pengalokasian keuangan Badan Diklat Provinsi Bengkulu, jika ada kesenjangan antara kebutuhan dengan biaya yang tersedia program mana yang mengalami kesenjangan?
12. Bagaimanakah mengatasi kesenjangan dalam pengalokasian administrasi keuangan di Badan Diklat Provinsi Bengkulu?
13. Bagaimanakah penatausahaan administrasi keuangan Badan Diklat Provinsi Bengkulu?
14. Apakah setiap penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran dalam pengelolaan administrasi keuangan dipergunakan sesuai dengan pihak-pihak yang berhak?
15. Bila dipergunakan sesuai dengan pihak-pihak yang berhak, Apakah ada pertanggungjawaban?
16. Bagaimanakah pertanggungjawaban penggunaan pembiayaan keuangan Badan Diklat Provinsi Bengkulu?
17. Apakah ada pengawasan dari pihak Setda Provinsi atau Inspektorat Provinsi dalam pelaksanaan administrasi keuangan di Badan Diklat Provinsi Bengkulu?
18. Bagaimana pengawasan yang dilakukan terhadap administrasi keuangan di Badan Diklat Provinsi Bengkulu?

Lampiran. 3

NO.	ASPEK YANG DINILAI	OPSI	
		YA	TIDAK
A	Sumber dana administrasi keuangan		
1	Memiliki dokumen keuangan	√	
2	Memiliki dokumen peraturan keuangan	√	
3	Dokumen pendukung administrasi keuangan	√	
B	Pengalokasian administrasi keuangan		
4	Merumuskan program-program strategis	√	
5	Dokumen alokasi anggaran	√	
6	Dokumen RKA SKPD	√	
7	Dokumen DPA SKPD	√	
8	Dokumen Renja SKPD	√	
9	Dokumen Lakip SKPD	√	
C	Perencanaan Administrasi keuangan		
10	Membuat jadwal perencanaan	√	
11	Membentuk Tim perencanaan		√
12	Membuat dokumen perencanaan	√	
13	Menganalisis perencanaan anggaran	√	
D	Penatausahaan Administrasi Keuangan		
14	Buku pedoman penatausahaan administrasi keuangan	√	
15	Prosedur penatausahaan keuangan	√	
16	Penyusunan jadwal penatausahaan administrasi keuangan		√
E	Pertanggungjawaban administrasi keuangan		
17	SK penanggungjawab Tim pembuatan laporan	√	
18	Dokumen pelaporan	√	
19	Dokumen SPJ	√	

F	Pengawasan Administrasi keuangan		
20	Dokumen Pengawasan dari pihak Inspektorat	√	
21	Dokumen pengawasan dari Inpektorat Jenderal Kemendagri	√	
22	Dokumen pengawasan dari BPK		√

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

- Hari/Tanggal : Selasa, 28 Mei 2013
- Pukul : 08.30 Wib
- Responden : E T, SE
- Jabatan : Kepala Badan Diklat Provinsi Bengkulu
-
- Peneliti : Assalamu'alaikum Pak, Terima kasih atas kesedian Bapak meluangkan waktunya. Ada beberapa hal yang ingin saya ketahui dari Bapak terkait penelitian saya. Sejak kapanakah Badan Diklat ini Berdiri?
- Responden : Badan Diklat Provinsi Bengkulu berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 30 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Bengkulu
- Peneliti : Untuk kelangsungan program ini tentu diperlukan dana yang besar, dari manakah sumber-sumber dana Keuangan di Badan Diklat?
- Responden : Sumber anggaran dari berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tapi sekarang telah ada juga anggaran dari Pusat
- Peneliti : Apakah sumber-sumber dana tersebut semuanya terealisasi?
- Responden : tidak, biasanya setiap akhir tahun anggaran masih tersisa anggaran yang tidak terpakai dan dijadikan Silva.
- Peneliti : Dapatkah bapak menyebutkan berapa jumlah masing-masing sumber dana tersebut?
- Responden : Kalau dijelaskan satu persatu panjang, namun lebih jelasnya dapat dilihat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Diklat Provinsi Bengkulu.
- Peneliti : Apakah pengalokasian dana keuangan di Badan Diklat Provinsi Bengkulu?
- Responden : Alokasi dana keuangan dibagi kedalam alokasi untuk belanja pegawai, barang dan jasa dan modal, kemudian dibagi lagi kedalam belanja langsung dan tidak langsung.
- Peneliti : Apakah mekanisme pengalokasian administrasi keuangan Badan Diklat Provinsi Bengkulu?

- Responden : iya tentu ada mekanismenya, yang diatur dalam peraturan daerah, disesuaikan dengan kebutuhan ril badan diklat untuk masing masing alokasi belanja.
- Peneliti : Program/kegiatan Diklat yang manakah mendapatkan prioritas alokasi anggaran Badan Diklat Provinsi Bengkulu?
- Responden : kegiatan rutin itu jelas mendapat prioritas utama kemudian baru kegiatan bidang-bidang.
- Peneliti : Bagaimanakah Perencanaan administrasi keuangan di Badan Diklat Provinsi Bengkulu?
- Responden : perencanaan administrasi keuangan dimulai dari penyusunan anggaran kas yang kemudian dari anggaran kas tersebut disusun perencanaan penggunaan dana yang termuat dalam DPA.
- Peneliti : Apakah ada kesenjangan dalam pengalokasian keuangan Badan Diklat Provinsi Bengkulu, jika ada kesenjangan antara kebutuhan dengan biaya yang tersedia program mana yang mengalami kesenjangan?
- Responden : Pasti ada, namun bisa diatasi masalahnya.
- Peneliti : Bagaimanakah mengatasi kesenjangan dalam pengalokasian administrasi keuangan di Badan Diklat Provinsi Bengkulu?
- Responden : Paling kalaupun ada kegiatan yang dananya tidak mencukupi dilakukan revisi anggaran atau diusulkan dalam APBDP.
- Peneliti : Bagaimanakah penatausahaan administrasi keuangan Badan Diklat Provinsi Bengkulu?
- Responden : iya berdasarkan DPA, Bendahara melaksanakan pengajuan SPD, selanjutnya SPP, SPM untuk menerbitkan SP2D sebagai dasar pencairan uang yang kemudian dibelanjakan sesuai dengan item belanja.
- Peneliti : Apakah setiap penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran dalam pengelolaan administrasi keuangan dipergunakan sesuai dengan pihak-pihak yang berhak?
- Responden : iya.
- Peneliti : Bila dipergunakan sesuai dengan pihak-pihak yang berhak, Apakah ada pertanggungjawaban?
- Responden : iya tentu. Masing-masing pengeluaran mesti harus dibuat pertanggungjawabannya atau yang disebut dengan SPJ.
- Peneliti : Bagaimanakah pertanggungjawaban penggunaan pembiayaan keuangan Badan Diklat Provinsi Bengkulu?
- Responden : biasanya para bendahara membuat SPJ masing-masing kegiatan dan juga dibuat laporan realisasi anggaran per triwulan, semesteran dan tahunan.

- Peneliti : Apakah ada pengawasan dari pihak Setda Provinsi atau Inspektorat Provinsi dalam pelaksanaan administrasi keuangan di Badan Diklat Provinsi Bengkulu?
- Responden : iya ada, biasanya Setda Bengkulu melalui Biro Pengelolaan Keuangan melaksanakan rekonsiliasi atas realisasi anggaran. Sedangkan Inspektorat melakukan pemeriksaan per semester guna mengetahui realisasi anggaran yang telah terserap.
- Peneliti : Bagaimana pengawasan yang dilakukan terhadap administrasi keuangan di Badan Diklat Provinsi Bengkulu?
- Responden : pengawasan telah dilaksanakan dengan cukup baik, apalagi banyaknya pemeriksaan baik yang dilakukan oleh internal pemerintah maupun eksternal seperti BPK membuat para bendahara selalu menyiapkan SPJ secara lengkap.

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

- Hari/Tanggal : Selasa, 28 Mei 2013
- Pukul : 11.00 Wib
- Responden : T H, SH
- Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan
-
- Peneliti : Assalamu'alaikum Ibu, maaf mengganggu waktunya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sama ibu terkait administrasi keuangan di Badan Diklat Provinsi Bengkulu.
Sejak kapankah Badan Diklat ini Berdiri?
- Responden : Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 30 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Bengkulu
- Peneliti : Untuk kelangsungan program ini tentu diperlukan dana yang besar, dari manakah sumber-sumber dana Keuangan di Badan Diklat?
- Responden : Sumber anggaran dari berasal tentunya dari APBD
- Peneliti : Apakah sumber-sumber dana tersebut semuanya terealisasi?
- Responden : ada sisa biasanya, tidak habis semua, ada juga yang disetor lagi ke kas negara.
- Peneliti : Dapatkah Ibu menyebutkan berapa jumlah masing-masing sumber dana tersebut?
- Responden : lihat di DPA, karena disana lengkap anggaran untuk masing masing kegiatan. Nanti saya perlihatkan DPAnya.
- Peneliti : Apakah pengalokasian dana keuangan di Badan Diklat Provinsi Bengkulu?
- Responden : Alokasi dana keuangan dibagi lagi kedalam belanja langsung dan tidak langsung. Baik untuk belanja pegawai, belanja rutin dan belanja kegiatan bidang.
- Peneliti : Apakah mekanisme pengalokasian administrasi keuangan Badan Diklat Provinsi Bengkulu?
- Responden : sudah diatur dan disesuaikan dengan alokasi masing masing belanja, biasanya bagian perencanaan yang membagi alokasinya.

- Peneliti : Program/kegiatan Diklat yang manakah mendapatkan prioritas alokasi anggaran Badan Diklat Provinsi Bengkulu?
- Responden : kegiatan rutin dan kegiatan pengadaan sebab kegiatan ini untuk menunjang operasional kantor Badan Diklat.
- Peneliti : Bagaimanakah Perencanaan administrasi keuangan di Badan Diklat Provinsi Bengkulu?
- Responden : iya dimulai dari penyusunan anggaran kas yang kemudian disusun perencanaan penggunaan dana yang termuat dalam DPA.
- Peneliti : Apakah ada kesenjangan dalam pengalokasian keuangan Badan Diklat Provinsi Bengkulu, jika ada kesenjangan antara kebutuhan dengan biaya yang tersedia program mana yang mengalami kesenjangan?
- Responden : ada, namun bisa diatasi.
- Peneliti : Bagaimanakah mengatasi kesenjangan dalam pengalokasian administrasi keuangan di Badan Diklat Provinsi Bengkulu?
- Responden : iya melaksanakan revisi atau APBD Perubahan.
- Peneliti : Bagaimanakah penatausahaan administrasi keuangan Badan Diklat Provinsi Bengkulu?
- Responden : Bendahara melaksanakan pengajuan SPD, selanjutnya SPP, SPM dan terakhir SP2D untuk pencairan.
- Peneliti : Apakah setiap penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran dalam pengelolaan administrasi keuangan dipergunakan sesuai dengan pihak-pihak yang berhak?
- Responden : iya, dan disesuaikan juga untuk masing masing bidang dan kegiatan
- Peneliti : Bila dipergunakan sesuai dengan pihak-pihak yang berhak, Apakah ada pertanggungjawaban?
- Responden : iya, kan nantinya harus ada SPJ keuangan.
- Peneliti : Bagaimanakah pertanggungjawaban penggunaan administrasi keuangan Badan Diklat Provinsi Bengkulu?
- Responden : ya tentu dibuat laporan realisasi anggaran per triwulan, semesteran dan tahunan.
- Peneliti : Apakah ada pengawasan dari pihak Setda Provinsi atau Inspektorat Provinsi dalam pelaksanaan administrasi keuangan di Badan Diklat Provinsi Bengkulu?
- Responden : iya ada, Biro Pengelolaan Keuangan melaksanakan rekonsiliasi atas realisasi anggaran. Inspektorat melakukan pemeriksaan per semester guna mengetahui realisasi anggaran yang telah terserap.
- Peneliti : Bagaimana pengawasan yang dilakukan terhadap administrasi keuangan di Badan Diklat Provinsi Bengkulu?
- Responden : iya sudah cukup baik sampai saat ini.

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

- Hari/Tanggal : Rabu, 28 Mei 2013
- Pukul : 08.00 Wib
- Responden : Z E, SE
- Jabatan : Bendahara Pengeluaran
-
- Peneliti : Selamat pagi Bapak, maaf mengganggu waktunya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sama ibu terkait administrasi keuangan di Badan Diklat Provinsi Bengkulu.
Sejak kapankah Badan Diklat ini Berdiri?
- Responden : Sebentar saya lihat. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 30 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Bengkulu, ini ada catatannya.
- Peneliti : Untuk kelangsungan program ini tentu diperlukan dana yang besar, dari manakah sumber-sumber dana Keuangan di Badan Diklat?
- Responden : Sumbernya dari APBD
- Peneliti : Apakah sumber-sumber dana tersebut semuanya terealisasi?
- Responden : biasanya ada sisa, karena ada saja belanja yang tidak dapat dibelanjakan ataupun dikelembalikan ke kas negara seperti belanja perjalanan dinas, kan pakai at cost, jadi disesuaikan dengan SPJnya dan jika berlebih dikembalikan.
- Peneliti : Dapatkah Bapak menyebutkan berapa jumlah masing-masing sumber dana tersebut?
- Responden : iya lihat saja di DPA, disana lengkap kok, nanti saya perlihatkan kalau mau.
- Peneliti : Bagaimana pengalokasian dana keuangan di Badan Diklat Provinsi Bengkulu?
- Responden : dana keuangan dikelompokkan kedalam belanja langsung dan tidak langsung. Baik untuk belanja pegawai, belanja rutin dan belanja kegiatan bidang. Kalau yang saya pegang itu belanja rutin.
- Peneliti : Apakah mekanisme pengalokasian administrasi keuangan Badan Diklat Provinsi Bengkulu?

- Responden : iya ada proporsinya masing masing, disesuaikan dengan anggaran kas.
- Peneliti : Program/kegiatan Diklat yang manakah mendapatkan prioritas alokasi anggaran Badan Diklat Provinsi Bengkulu?
- Responden : kalau diklat semuanya prioritas, tidak ada yang lebih satu dengan yang lain.
- Peneliti : Bagaimanakah Perencanaan administrasi keuangan di Badan Diklat Provinsi Bengkulu?
- Responden : perencanaan disusun dari item yang termuat dalam DPA.
- Peneliti : Apakah ada kesenjangan dalam pengalokasian keuangan Badan Diklat Provinsi Bengkulu, jika ada kesenjangan antara kebutuhan dengan biaya yang tersedia program mana yang mengalami kesenjangan?
- Responden : ada, sedikit.
- Peneliti : Bagaimanakah mengatasi kesenjangan dalam pengalokasian administrasi keuangan di Badan Diklat Provinsi Bengkulu?
- Responden : paling revisi atau masuk APBD Perubahan.
- Peneliti : Bagaimanakah penatausahaan administrasi keuangan Badan Diklat Provinsi Bengkulu?
- Responden : dimulai dari pengajuan SPD, selanjutnya SPP, SPM dan terakhir SP2D untuk pencairan.
- Peneliti : Apakah setiap penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran dalam pengelolaan administrasi keuangan dipergunakan sesuai dengan pihak-pihak yang berhak?
- Responden : iya, dan disesuaikan juga untuk masing masing bidang dan kegiatan
- Peneliti : Bila dipergunakan sesuai dengan pihak-pihak yang berhak, Apakah ada pertanggungjawaban?
- Responden : iya, kan nantinya harus ada SPJ keuangan.
- Peneliti : Bagaimanakah pertanggungjawaban penggunaan administrasi keuangan Badan Diklat Provinsi Bengkulu?
- Responden : dibuat laporan realisasi anggaran per triwulan, semesteran dan tahunan.
- Peneliti : Apakah ada pengawasan dari pihak Setda Provinsi atau Inspektorat Provinsi dalam pelaksanaan administrasi keuangan di Badan Diklat Provinsi Bengkulu?
- Responden : iya ada, Inspektorat melakukan pemeriksaan per semester guna mengetahui realisasi anggaran yang telah terserap.
- Peneliti : Bagaimana pengawasan yang dilakukan terhadap administrasi keuangan di Badan Diklat Provinsi Bengkulu?
- Responden : biasanya masing masing bendahara saling berkoordinasi.

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

- Hari/Tanggal : Rabu, 28 Mei 2013
- Pukul : 11.00 Wib
- Responden : Y T, S.Sos
- Jabatan : Bendahara Penerimaan
-
- Peneliti : Selamat Siang Bapak, maaf mengganggu waktunya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sama Bapak selaku bendahara penerimaan dan juga terkait administrasi keuangan di Badan Diklat Provinsi Bengkulu.
Sejak kapankah Badan Diklat ini Berdiri?
- Responden : memang awalnya terus berganti sebelumnya namun terakhir Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 30 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Bengkulu, ini ada catatannya.
- Peneliti : Untuk kelangsungan program ini tentu diperlukan dana yang besar, dari manakah sumber-sumber dana Keuangan di Badan Diklat?
- Responden : APBD, namun untuk penerimaan berasal dari sewa asrama, ruang kelas dan aula serta dari diklat kabupaten/kota atau swadana
- Peneliti : Apakah sumber-sumber dana tersebut semuanya terealisasi?
- Responden : iya pasti ada sisanya, tidak habis semua. Namun khusus untuk penerimaan biasanya kita tidak dapat mencapai target disebabkan tidak semua kabupaten/kota menganggarkan biaya untuk diklat.
- Peneliti : Dapatkah Bapak menyebutkan berapa jumlah masing-masing sumber dana tersebut?
- Responden : iya lihat saja di DPA, disana lengkap kok, nanti saya perlihatkan kalau mau.
- Peneliti : Bagaimana pengalokasian dana keuangan di Badan Diklat Provinsi Bengkulu?
- Responden : untuk belanja rutin dan belanja kegiatan.
- Peneliti : Apakah mekanisme pengalokasian administrasi keuangan Badan Diklat Provinsi Bengkulu?

- Responden : iya disesuaikan dengan anggaran kas.
 Peneliti : Program/kegiatan Diklat yang manakah mendapatkan prioritas alokasi anggaran Badan Diklat Provinsi Bengkulu?
- Responden : kalau diklat semuanya prioritas, tidak ada yang lebih satu dengan yang lain.
 Peneliti : Bagaimanakah Perencanaan administrasi keuangan di Badan Diklat Provinsi Bengkulu?
- Responden : perencanaan disusun dari item yang termuat dalam DPA.
 Peneliti : Apakah ada kesenjangan dalam pengalokasian keuangan Badan Diklat Provinsi Bengkulu, jika ada kesenjangan antara kebutuhan dengan biaya yang tersedia program mana yang mengalami kesenjangan?
- Responden : ada, sedikit.
 Peneliti : Bagaimanakah mengatasi kesenjangan dalam pengalokasian administrasi keuangan di Badan Diklat Provinsi Bengkulu?
- Responden : revisi dan APBD Perubahan. Bagian perencanaan biasanya yang lebih tahu.
 Peneliti : Bagaimanakah penatausahaan administrasi keuangan Badan Diklat Provinsi Bengkulu?
- Responden : dimulai dari pengajuan SPD, selanjutnya SPP, SPM dan terakhir SP2D untuk pencairan.
 Peneliti : Apakah setiap penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran dalam pengelolaan administrasi keuangan dipergunakan sesuai dengan pihak-pihak yang berhak?
- Responden : iya, dan disesuaikan juga untuk masing masing bidang dan kegiatan
 Peneliti : Bila dipergunakan sesuai dengan pihak-pihak yang berhak, Apakah ada pertanggungjawaban?
- Responden : iya, kan nantinya harus ada SPJ keuangan.
 Peneliti : Bagaimanakah pertanggungjawaban penggunaan administrasi keuangan Badan Diklat Provinsi Bengkulu?
- Responden : biasanya bendahara penerimaan menyusun bku, dan kelengkapan lainnya.
 Peneliti : Apakah ada pengawasan dari pihak Setda Provinsi atau Inspektorat Provinsi dalam pelaksanaan administrasi keuangan di Badan Diklat Provinsi Bengkulu?
- Responden : iya ada.
 Peneliti : Bagaimana pengawasan yang dilakukan terhadap administrasi keuangan di Badan Diklat Provinsi Bengkulu?
- Responden : biasanya masing masing bendahara saling berkoordinasi

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

- Hari/Tanggal : Kamis, 29 Mei 2013
- Pukul : 10.00 Wib
- Responden : Y D, S.Sos
- Jabatan : Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan
-
- Peneliti : Selamat Siang Bapak, Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sama Bapak selaku kepala bagian perencanaan dan pelaporan dan juga terkait administrasi keuangan di Badan Diklat Provinsi Bengkulu.
Sejak kapankah Badan Diklat ini Berdiri?
- Responden : ini ada dalam profil Badan Diklat dan kalau tidak salah dasarnya adalah Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 30 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Bengkulu, ini saya perlihatkan profilnya dan disini lengkap mengenai sejarah badan diklat.
- Peneliti : Untuk kelangsungan program ini tentu diperlukan dana yang besar, dari manakah sumber-sumber dana Keuangan di Badan Diklat?
- Responden : APBD, disusun per tahun anggaran dan juga bersama sama dengan SKPD lainnya dalam lingkup Provinsi Bengkulu
- Peneliti : Apakah sumber-sumber dana tersebut semuanya terealisasi?
- Responden : yang lebih tahu di sub bagian keuangan atau bendahara pengeluaran, namun saya pasti ada sisa sebab setiap pelaporan ada saldo sisa biasanya.
- Peneliti : Dapatkah Bapak menyebutkan berapa jumlah masing-masing sumber dana tersebut?
- Responden : di DPA ada semua.
- Peneliti : Bagaimana pengalokasian dana keuangan di Badan Diklat Provinsi Bengkulu?
- Responden : ini belanja pegawai, belanja rutin dan belanja kegiatan bidang. Kami Cuma menyusunnya saja nanti untuk pelaksanaannya diserahkan kebidang atau bagian masing masing.

- Peneliti : Apakah mekanisme pengalokasian administrasi keuangan Badan Diklat Provinsi Bengkulu?
- Responden : iya ada proporsinya masing masing, disesuaikan dengan anggaran kas.
- Peneliti : Program/kegiatan Diklat yang manakah mendapatkan prioritas alokasi anggaran Badan Diklat Provinsi Bengkulu?
- Responden : kalau diklat semuanya prioritas, tidak ada yang lebih satu dengan yang lain.
- Peneliti : Bagaimanakah Perencanaan administrasi keuangan di Badan Diklat Provinsi Bengkulu?
- Responden : perencanaan disusun dari item yang termuat dalam DPA.
- Peneliti : Apakah ada kesenjangan dalam pengalokasian keuangan Badan Diklat Provinsi Bengkulu, jika ada kesenjangan antara kebutuhan dengan biaya yang tersedia program mana yang mengalami kesenjangan?
- Responden : ada,
- Peneliti : Bagaimanakah mengatasi kesenjangan dalam pengalokasian administrasi keuangan di Badan Diklat Provinsi Bengkulu?
- Responden : revisi atau masuk APBD Perubahan. Ini kami lagi menyusun revisi untuk salah satu kegiatan.
- Peneliti : Bagaimanakah penatausahaan administrasi keuangan Badan Diklat Provinsi Bengkulu?
- Responden : dimulai dari pengajuan SPD, selanjutnya SPP, SPM dan terakhir SP2D untuk pencairan.
- Peneliti : Apakah setiap penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran dalam pengelolaan administrasi keuangan dipergunakan sesuai dengan pihak-pihak yang berhak?
- Responden : iya,
- Peneliti : Bila dipergunakan sesuai dengan pihak-pihak yang berhak, Apakah ada pertanggungjawaban?
- Responden : iya, kan nantinya harus ada SPJ keuangan.
- Peneliti : Bagaimanakah pertanggungjawaban penggunaan administrasi keuangan Badan Diklat Provinsi Bengkulu?
- Responden : dibuat laporan realisasi anggaran per triwulan, semesteran dan tahunan.
- Peneliti : Apakah ada pengawasan dari pihak Setda Provinsi atau Inspektorat Provinsi dalam pelaksanaan administrasi keuangan di Badan Diklat Provinsi Bengkulu?
- Responden : iya pemeriksaan Inspektorat semesteran atau tahunan.
- Peneliti : Bagaimana pengawasan yang dilakukan terhadap administrasi keuangan di Badan Diklat Provinsi Bengkulu?
- Responden : iya paling melalui pemeriksaan rutin dari BPK atau Inspektorat biasanya.